

## ANALISIS KOMITMEN *STAKEHOLDER* DALAM KEMITRAAN UPAYA PENANGULANGAN *STUNTING* MELALUI INTERVENSI GIZI SENSITIF

Minnalia Soakakone<sup>1\*</sup>, Sutopo Patria Jati<sup>2</sup>, Apoina Kartini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto No.1269,  
 Semarang 50275, Indonesia

\*Corresponding author: [minnaliaSoakakone@gmail.com](mailto:minnaliaSoakakone@gmail.com)

### ABSTRACT

*Partnership is relationship that was build between various parties both individuals, groups and organizations that interacted with each other and coordination in achieving common goals. In carrying out health development the Government cannot move on its own without involving non-government stakeholders who have an important role in tackling stunting. The purpose of this study was to determine stakeholder commitment in a partnership to reduce stunting through sensitive nutrition interventions. The types of qualitative research were analyzed descriptively and in-depth interviews and observations. Research location in Central Maluku Regency, 2019. The results of the study explained that there was already a division of roles of the relevant regional apparatus organizations in terms of stunting efforts within the scope of local government and community leaders but there was no division of roles with non-governmental organizations. In terms of partnership experience, all relevant regional apparatus organizations have collaborated, but there is no experience in partnering with non-government organizations. For special fund allocations, there is no budget allocation for special funds for stunting prevention in the regions, thus hampering the smooth operation of partnership activities. Based on the results of the study it can be concluded that there has been no partnership relationship established between the local government and non-governmental organizations in terms of stunting prevention efforts, this is evident in the division of roles and experiences in partnering with stunting prevention efforts not yet involved, and for the allocation of special funds for stunting prevention has not been regulated in the regions because there is no regional action plan yet.*

**Keywords:** *Commitment, partner experience, stakeholder role.*

### ABSTRAK

Kemitraan merupakan relasi yang terbangun antara berbagai pihak baik individu, kelompok maupun organisasi yang saling berinteraksi dan berkoordinasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam menjalankan pembangunan kesehatan Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri tanpa melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah yang memiliki peranan penting dalam penanggulangan *stunting*. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui komitmen stakeholder dalam kemitraan upaya penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif. Jenis penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriptif dan wawancara mendalam dan observasi. Lokasi penelitian di Kabupaten Maluku Tengah, tahun 2019. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sudah ada pembagian peran organisasi perangkat daerah terkait dalam hal upaya penanggulangan *stunting* dalam lingkup pemerintah daerah dan tokoh masyarakat namun belum ada pembagian peran dengan lembaga swadaya masyarakat. Dalam hal

pengalaman bermitra semua organisasi perangkat daerah terkait telah melakukan hubungan kerjasama namun belum ada pengalaman bermitra bersama dengan lembaga swadaya masyarakat. Untuk alokasi dana khusus, belum ada penganggaran alokasi dana khusus penanggulangan *stunting* di daerah, maka memperhambat kelancaran kegiatan kemitraan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum ada hubungan kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dengan lembaga swadaya masyarakat dalam hal upaya penanggulangan *stunting*, hal ini terbukti dalam pembagian peran dan pengalaman bermitra upaya penanggulangan *stunting* belum melibatkan, dan untuk alokasi dana khusus penanggulangan *stunting* belum di atur di daerah karena belum ada pembentukan rencana aksi daerah.

**Kata Kunci:** Dana, Komitmen, Pengalaman mitra, Peran *stakeholder*.

## PENDAHULUAN

Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) 28,0. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013), menyajikan prevalensi pendek (*Stunting*) menurut provinsi dan nasional. Prevalensi pendek secara nasional tahun 2013 adalah 37,2 % yang berarti terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2010 (35,6%) dan 2007 (36,8%). Prevalensi pendek sebesar 37,2 % terdiri dari 18,0 % sangat pendek dan 19,2 % pendek. Terdapat 15 provinsi diatas prevalensi nasional, Masalah kesehatan masyarakat dianggap berat bila prevalensi pendek sebesar 30 – 39 persen dan serius bila prevalensi pendek  $\geq 40$  persen (WHO 2010).

Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) di Kabupaten Maluku Tengah, prevalensi *Stunting* untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Prevalensi *Stunting* pada tahun

2015 sebesar 21,1%, pada tahun 2016 sebesar 23,2%, dan tahun 2017 sebesar 32%. (Aryastami & Tarigan, 2017)

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan juni – juli tahun 2018, terdapat beberapa informasi yang memiliki kesenjangan yang cukup tinggi, Kekurangan Gizi pada anak balita seperti *stunting* (pendek), masih menjadi masalah kesehatan yang cukup besar bagi masyarakat di Indonesia termasuk di Kabupaten Maluku Tengah. Angka penderita *stunting* di kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut 2015, 2016 dan 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hasil PSG penderita *stunting* di Maluku Tengah tahun 2015 mencapai 21,1 %, tahun 2016 mencapai 23,2 % dan tahun 2017 mencapai angka 32 %, yang berada pada 10 desa/negeri yaitu; negeri Trana kecamatan TNS, negeri Roho kecamatan Seram Utara, negeri Maneo

Rendah kecamatan Seram Utara Timur Kobi, negeri SetSeti dan Tihuan kecamatan Seram Utara Timur Seti, negeri Moso dan Piliang kecamatan Tehoru, negeri Waer negeri Pulau Hatta kecamatan Banda serta negeri Haria kecamatan Saparua. Upaya untuk mengantisipasi penurunan angka *stunting* di kabupaten Maluku Tengah maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan RI bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Maluku tengah telah melaksanakan Sosialisasi Percepatan Penurunan *Stunting*, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan para tenaga medis pada Dinas Kesehatan Maluku Tengah, para Kepala Desa/Raja masing-masing negeri penderita *stunting* serta Pimpinan Puskesmas yang ada di kecamatan tersebut. Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas kesehatan yang merupakan penanggung jawab program penanganan *stunting* menyatakan bahwa selama ini *stunting* sudah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan juga sudah meluncurkan rencana aksi Nasional penanganan *stunting*, dan Upaya yang sudah dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten Maluku tengah yaitu upaya pemberitahuan kepada semua Puskesmas untuk menjalankan dan memperhatikan program *stunting*, dinas kesehatan juga

sudah melakukan sosialisasi garam yodium, surveilans, dan juga pelatihan khusus dan bimbingan konseling bagi kader, petugas gizi, bidan desa di semua puskesmas di Maluku tengah, namun *stunting* tidak menurun tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.<sup>2</sup> informasi tentang berbagai kesenjangan tersebut adalah masukan yang berharga untuk menyusun alternatif strategi penguatan kapasitas sesuai prioritas kebutuhan dan permasalahan komitmen *stakeholder*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif yang disajikan secara deskriptif eksploratif melalui observasi dan wawancara mendalam.

## HASIL PENELITIAN:

### Identifikasi Karakteristik Subjek Penelitian yang terdiri dari Informan utama dan informan Triangulasi

Dalam penelitian ini informan utama penelitian merupakan Stakeholder yang merupakan pelaksana dalam program 1000 HPK berdasarkan peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang gerakan Nasional percepatan perbaikan gizi yang terdiri atas pemerintah daerah, lembaga swadaya tokoh masyarakat. Informan utama berjumlah 11 instansi

pemerintah yang terdiri dari 11 orang yaitu Kepala dinas perikanan, kepala dinas Sosial, kepala bidang PPMN, kepala bidang persandian Kominfo, kepala seksi sumberdaya pangan, kepala seksi PAUD dan dikmas, sekretaris dinas lingkungan hidup, kepala seksi Produksi, pengelolaan hasil tanaman pangan, kepala dinas PU, kepala seksi dinas kesehatan, Sekertaris camat TNS dan 1 lembaga swadaya masyarakat yaitu penanggung jawab air swadaya dan 1 kepala desa trana.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan utama sebanyak 13 orang yang terlibat dalam upaya penurunan *stunting* melalui kemitraan bersama, maka hasil yang didapatkan yaitu dilihat dari kisaran umur informan berkisar terdiri 41-56 tahun, dan bekerja di instansi pemerintah berjumlah 11 orang dan 1 informan dari lembaga swadaya masyarakat dan 1 merupakan tokoh masyarakat yaitu kepala desa, meskipun sebagian besar jenis kelamin informan laki-laki dan perempuan hanya 3 orang namun untuk pendidikan terakhir sarjana dan magister sama banyak, untuk jabatan ada 3 kepala dinas, sekretaris dinas dan camat, kepala bidang, kepala seksi, dan kepala desa dan penanggung jawab swadaya masyarakat.

Informan Triangulasi pada penelitian ini merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung khususnya dalam upaya penanggulangan *stunting* tetapi sebagai tim pengawasan di kabupaten Maluku tengah yaitu BAPEDA dan Sekertaris daerah dan Puskesmas.

Dari hasil wawancara mendalam dengan informan triangulasi sebanyak 3 orang yang terlibat dalam upaya penurunan *stunting* melalui kemitraan bersama, maka hasil yang didapatkan yaitu dilihat dari kisaran umur informan berkisar 38-52 tahun, dan untuk informan triangulasi terdiri dari Sekertaris daerah, kepala bidang, dan pihak Puskesmas.

### **Hasil Identifikasi dan deskripsi variabel penelitian**

#### **Keahlian dan kesepakatan peran *stakeholder* dalam kemitraan untuk mendukung upaya penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif.**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan utama dalam hal ini pemerintah daerah tentang keahlian dan kesepakatan peran *stakeholder* dalam upaya penanggulangan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif, maka menjelaskan masing-masing peran *stakeholder* dalam

kemitraan ini dilihat melalui kesepakatan peran lintas sektor masing-masing perannya dalam kemitraan penanggulangan *stunting* lebih berfokus pada tanggung jawab dan tugas pokok instansi masing-masing yang berkaitan dengan upaya penanggulangan *stunting* di kabupaten Maluku tengah.

Dari hasil wawancara mendalam dengan informan utama dalam hal ini sebagai penanggungjawab air swadaya masyarakat menyebutkan peran swadaya dalam kemitraan upaya penanggulangan *stunting* lebih berfokus pada bidang pembangunan yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah, dan berdasarkan kutipan wawancara maka dapat dilihat minimnya penyediaan air bersih yang dinilai kurang baik oleh masyarakat di kabupaten Maluku Tengah.

Dan untuk kutipan wawancara mendalam dengan kepala desa menyatakan peran kepala desa sebagai penggerak dalam desa dan mengkoordinasi dan mengatur dana desa untuk membantu upaya penanggulangan *stunting*. Maka dapat dilihat peran kepala desa sangat dibutuhkan dalam hal pemanfaatan dana desa dalam memperhatikan upaya - upaya penanggulangan *stunting* melalui program desa.

Hal ini sejalan dengan informan triangulasi dari hasil wawancara mendalam dengan informan triangulasi maka dapat dilihat melalui kutipan wawancara yang menyatakan peran dari masing-masing informan triangulasi memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal ini sebagai penggerak di daerah dan ujung tombak kesehatan masyarakat sekaligus memonitoring, merencanakan, mengkoordinasi dan memberikan pelayanan yang baik dalam hal upaya penanggulangan *stunting*.

#### **Pengalaman mitra dalam kemitraan lintas sektor untuk mendukung upaya penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif.**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam tentang pengalaman mitra dalam kemitraan untuk mendukung upaya penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif dari masing-masing *stakeholder* pemerintah daerah maka dari kutipan wawancara mendalam menjelaskan bahwa semua informan utama menyebutkan sudah pernah dilakukan pengalaman mitra bersama yang dilakukan melalui berbagai kegiatan baik melalui lintas program hingga lintas sektor, namun ada beberapa informan utama yang menyebutkan perlu adanya komitmen

bersama dan perlunya wadah khusus penanggulangan *stunting* agar semakin terarah dalam hal upaya penanggulangan *stunting*.

Dari hasil wawancara mendalam dengan informan utama dalam hal ini sebagai penanggungjawab lembaga swadaya masyarakat belum ada pengalaman mitra bersama dalam hal upaya penanggulangan *stunting*, tetapi bermitra bersama masyarakat dalam hal penyedia air bersih sudah sering dilakukan karena air bersih merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat, dilihat dari kutipan wawancara mendalam maka dapat dilihat bahwa masyarakat tidak menggunakan air PDAM karena sering gangguan dan tidak jalan secara baik sehingga dengan adanya air swadaya masyarakat maka masyarakat dapat terbantu. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan kepala desa maka dari kutipan wawancara diatas dapat dilihat pengalaman kepala desa dalam hal bermitra turut berpartisipasi dalam menghadiri beberapa kegiatan yang diundang maka dari pengalaman yang pernah diikuti tersebut beliau dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab dalam hal upaya penanggulangan *stunting*.

Hal ini sejalan dengan informan triangulasi yang menyatakan sudah

pernah dilakukan pertemuan lintas sektor melalui kegiatan rapat koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor dan pengalaman bermitra cukup baik dan partisipan namun masih dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang baik.

### **Dana dan pengalangan dana dalam kemitraan lintas sektor untuk mendukung upaya penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif**

Dari hasil wawancara mendalam dengan informan utama dalam hal ini pemerintah daerah mengenai dana dan pengalangan dana dalam kemitraan lintas sektor untuk mendukung upaya penurunan *stunting* maka semua informan utama menyatakan belum ada anggaran khusus dari daerah mengenai *stunting*, jadi untuk kebijakan biaya masing-masing program menyiapkan biaya untuk program masing-masing instansi sendiri, kemudian bantuan dana yang didapatkan dari pemerintah pusat melalui dinas kesehatan yaitu melalui dana dana BOKS (bantuan operasional kesehatan *stunting*), yang menjadi hambatan belum ada anggaran khusus di daerah yaitu belum ada rencana aksi daerah sehingga anggaran khusus daerah belum diatur secara khusus.

Dari hasil wawancara mendalam dengan informan utama dalam hal ini penanggungjawab swadaya masyarakat menyatakan tidak ada bantuan dana dari pihak manapun dalam hal upaya penanggulangan *stunting*, dana yang dimiliki berasal dari dana masyarakat itupun dipakai untuk kebutuhan swadaya tersebut.

Dari hasil wawancara mendalam dengan informan utama dalam hal ini kepala desa menyatakan bahwa bantuan dana yang ada pada desa berasal dari dana desa dalam hal ini desa harus bisa memanfaatkan dana desa secara baik dalam memperhatikan program-program desa yang berhubungan dengan *stunting*, bukan hanya itu bantuan dana yang didapatkan juga dari program keluarga harapan dari kementerian sosial yang langsung memberikan bantuan kepada rakyat miskin maka hal ini sangat terbantu dalam hal upaya penanggulangan *stunting*. Dan hal ini sejalan dengan informan triangulasi menyatakan belum ada dana secara khusus dari daerah dalam hal penanganan *stunting* namun ada dana bantuan baik dari pusat melalui alokasi dana desa, dana bantuan operasional kesehatan.

## **PEMBAHASAN**

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Identifikasi dan deskripsi Keahlian dan kesepakatan peran kemitraan berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan utama yang terdiri dari pemerintah daerah, swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat, dan informan triangulasi maka dari pernyataan semua informan utama dan informan triangulasi terhadap keahlian dan kesepakatan peran dilihat melalui kesepakatan peran lintas sektor, perannya dalam kemitraan penanggulangan *stunting* lebih berfokus pada tanggung jawab dan tugas pokok OPD masing-masing yang berkaitan dengan upaya penanggulangan *stunting* di kabupaten Maluku tengah, sedangkan untuk swadaya masyarakat menyebutkan peran swadaya dalam kemitraan upaya penanggulangan *stunting* lebih berfokus pada bidang pembangunan yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah, berdasarkan kutipan wawancara dilihat minimnya penyediaan air bersih yang dinilai kurang baik oleh masyarakat di kabupaten Maluku Tengah dan untuk tokoh masyarakat dalam hal ini kepala

desa berperan sebagai penggerak dalam desa dan mengkoordinasi dan mengatur dana desa untuk membantu upaya penanggulangan *stunting*.

Pembagian peran dalam kemitraan merupakan hal yang paling penting sehingga setiap mitra mengetahui peran atau tugas apa yang harus dijalankannya dalam menanggulangi permasalahan dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan didapatkan hasil bahwa setiap informan mengetahui apa peran dan fungsinya masing-masing, Adapun peran tersebut memang sesuai dengan keahlian yang mereka miliki.

Setelah dikorscek dengan hasil observasi melalui penilaian dokumen maka sudah terlampir peran lintas OPD terkait intervensi gizi sensitif dan intervensi spesifik pencegahan *stunting* secara tertulis pada lampiran dokumen surat edaran tentang implementasi komunikasi perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *stunting* dikabupaten Maluku tengah maka Hal ini sudah sangat baik sebagai bentuk wujud nyata dalam mendukung upaya penanggulangan *stunting*.

Hal ini sejalan dengan Soekanto (2002) dalam M. Ali.zuhri mengartikan peran sebagai aspek dinamis dari status

(kedudukan), apabila seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan ia telah menjalankan suatu peran.

Pengalaman merupakan faktor yang mampu mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia (SDM). Organisasi atau instansi yang memiliki pengalaman atau pernah bekerjasama berbasis kemitraan akan bisa menjalankan kemitraan tersebut lebih baik. Hal ini dikarenakan mereka dapat belajar dari pengalaman sebelumnya.

Identifikasi dan deskripsi Berdasarkan hasil wawancara dari segi pengalaman dalam bentuk kerjasama berbasis kemitraan, semua informan utama menyebutkan sudah pernah melakukan pengalaman mitra bersama yang dilakukan melalui berbagai kegiatan baik melalui lintas program hingga lintas sektor, namun ada beberapa informan utama yang menyebutkan perlu adanya komitmen bersama dan perlunya wadah khusus penanggulangan *stunting* agar semakin terarah dalam hal upaya penanggulangan *stunting* sedangkan sebagai penanggungjawab air swadaya masyarakat belum ada pengalaman mitra bersama dalam hal upaya penanggulangan *stunting*,

tetapi bermitra bersama masyarakat dalam hal penyedia air bersih sudah sering dilakukan karena air bersih merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat.

Berdasarkan kutipan wawancara maka dapat dilihat bahwa masyarakat tidak menggunakan air PDAM karena sering gangguan sehingga dengan adanya air swadaya masyarakat, maka masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pengalaman kepala desa dalam hal bermitra turut terlibat dan partisipan dalam menghadiri beberapa kegiatan yang diundang baik tingkat kabupaten hingga desa dalam memperhatikan program-program desa, maka dari pengalaman yang pernah diikuti tersebut beliau dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab dalam hal upaya penanggulangan *stunting*.

Pengalaman adalah suatu kegiatan atau proses yang pernah dialami oleh seseorang, pengalaman dalam hal ini adalah pengalaman yang sudah dijalankan dalam kemitraan. Pengalaman informan dalam kemitraan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu kemitraan. Semakin lama stakeholder melakukan kemitraan maka akan semakin

banyak pengalaman yang diperoleh mengenai kemitraan.

Hal ini sejalan dengan informan triangulasi yang menyatakan sudah pernah dilakukan pertemuan lintas sektor melalui kegiatan rapat koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor dan pengalaman bermitra cukup baik dan partisipan namun masih dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang baik, maka untuk meningkatkan komitmen di antara stakeholder peran BAPEDDA sangat penting dalam hal mengkoordinasi dan monitoring kegiatan.

Salah satu Sumber kebijakan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah ketersediaan sumber dana yang digunakan untuk upaya penanggulangan *stunting*, sumber dana perlu mendapatkan perhatian yang layak karena menunjang keberhasilan implementasi program kemitraan, jika kekurangan sumber dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program kemitraan, maka implementasi cenderung berjalan tidak efektif.

Dari hasil wawancara mendalam dengan informan utama dalam hal ini pemerintah daerah mengenai dana dan pengalangan dana dalam kemitraan lintas sektor untuk mendukung upaya penurunan *stunting*

maka semua informan utama menyatakan belum ada anggaran khusus dari daerah mengenai *stunting*, jadi untuk kebijakan biaya masing-masing program menyiapkan biaya untuk program masing-masing instansi sendiri, kemudian bantuan dana yang didapatkan dari pemerintah pusat melalui dinas kesehatan yaitu melalui dana dana BOKS (bantuan operasional kesehatan *stunting*).

Dalam hal ini penanggungjawab swadaya masyarakat menyatakan tidak ada bantuan dana dari pihak manapun dalam hal upaya penanggulangan *stunting*, dana yang dimiliki berasal dari dana masyarakat itupun dipakai untuk kebutuhan swadaya tersebut dan dalam hal ini kepala desa menyatakan bahwa bantuan dana yang ada pada desa berasal dari dana desa dalam hal ini desa harus bisa memanfaatkan dana desa secara baik dalam memperhatikan program-program desa yang berhubungan dengan *stunting*, bukan hanya itu bantuan dana yang didapatkan juga dari program keluarga harapan dari kementerian sosial yang langsung memberikan bantuan kepada rakyat miskin maka hal ini sangat terbantu dalam hal upaya penanggulangan *stunting*.

Namun adapun yang menjadi hambatan tidak ada alokasi dana khusus di daerah

untuk kelancaran kegiatan kemitraan *stunting*, hal ini dampak dari belum ada pembentukan rencana aksi daerah sehingga anggaran khusus daerah belum diatur, maka perlu adanya peran dan komitmen pemerintah daerah khususnya BAPEDDA sebagai monitoring dalam memperhatikan upaya penanggulangan *stunting* secara baik dengan cara memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya dilokasi dengan prevalensi tinggi.

#### **KESIMPULAN:**

a. Keahlian dan kesepakatan peran stakeholder untuk mendukung upaya penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif. perannya dalam kemitraan penanggulangan *stunting* lebih berfokus pada tanggung jawab dan tugas pokok OPD masing-masing yang berkaitan dengan upaya penanggulangan *stunting* di kabupaten Maluku tengah, sedangkan untuk swadaya masyarakat menyebutkan peran swadaya dalam kemitraan upaya penanggulangan *stunting* lebih berfokus pada bidang pembangunan seperti air bersih. sudah terlampir peran lintas OPD terkait intervensi gizi sensitif dan intervensi spesifik pencegahan *stunting* secara tertulis pada lampiran dokumen surat edaran tentang implementasi

komunikasi perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting dikabupaten Maluku tengah

b. Pengalaman mitra untuk mendukung upaya penurunan stunting melalui intervensi gizi sensitif.

Pengalaman mitra sudah dilakukan melalui berbagai kegiatan baik melalui lintas program hingga lintas sektor, namun ada beberapa informan utama yang menyebutkan perlu adanya komitmen bersama dan perlunya wadah khusus penanggulangan stunting agar semakin terarah dalam hal upaya penanggulangan *stunting* sedangkan sebagai penanggungjawab air swadaya masyarakat belum ada pengalaman mitra bersama dalam hal upaya penanggulangan stunting, tetapi bermitra bersama masyarakat dalam hal penyedia air bersih sudah sering dilakukan karena air bersih merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat.

c. Dana dan pengalangan dana dalam kemitraan lintas sektor untuk mendukung upaya penurunan stunting melalui intervensi gizi sensitif

Mengenai dana dan pengalangan dana dalam kemitraan belum ada anggaran khusus dari daerah mengenai *stunting*, jadi untuk kebijakan biaya masing-masing program menyiapkan biaya untuk program masing-masing instansi sendiri,

kemudian bantuan dana yang didapatkan dari pemerintah pusat melalui dinas kesehatan yaitu melalui dana dana BOKS (bantuan operasional kesehatan stunting

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang membantu.

## REFERENSI

- Aryastami, NK., & Tarigan I.( 2017). Kajian Kebijakan Dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting Di Indonesia. *Bul Penelit Kesehat [Internet]. 2017;45(4):233–40. Available From: Http://Ejournal.Litbang.Depkes.Go.I d/Index.Php/Bpk/Article/Download /7465/5434*
- Asiati D. ( 2017). Kemitraan Di Sektor Perikanan Tangkap : Strategi Untuk Kelangsungan Usaha Dan Pekerjaan ( Partnership In The Fishery Sector : *Strategies For Business And Employment Sustainability* ) 11(2):103–18.
- Adolfina. ( 2014). Analisis Keterkaitan Antara Kepuasan Kerja, Dan Komitmen Organisasi Dengan Kinerja Individu. *J Ris Ekon Manajemen, Bisnis Dan Akunt [Internet]. 2(3):864–71. 3.*
- Kementrian Kesehatan. Situasi Dan Analisis Gizi. Jakarta; 2015.
- Kementrian Kesehatan. ( 2017). 100 Desa Prioritas Pada 10 Kabupaten *Prioritas Stunting. 1–20.*
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. ( 2017). Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting. 2–13.
- World Health Organization. ( 2018). Global Strategy For Women’s, Children’s And Adolescents’ Health.

- Peraturan Presiden Ri No 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gzi.
- Kuswidanti. (2008). Gambaran Kemitraan Lintas Sektor Dan Organisasi Di Bidang Komunikasi Komite Nasional Flu Burung Dan Pandemi Influenza (Komnas Fbpi). *Adm Kebijakan Kesehat.*
- Melyantii. Pola Kemitraan Pemerintah , Civil Society , Dan Swasta Dalam Program Bank Sampah Di Pasar Baru Kota Probolinggo. 2014;2.
- Kementrian Kesehatan. Pedoman Menggalang Kemitraan Di Bidang Kesehatan. Jakarta; 2012.
- Hidayat R. (2013). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Komunikasi , Kepuasan Kerja , Dan Komitmen Organisasi Pada Industri Perbankan. *Makara Seri Sos Hum.* 17(1):19–32.
- Damayanti S, Ghalib S, Taharuddin. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi , Kepuasan Kerja Dan Komitmen Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Primkoppol Polres Palangka Raya(Sem-Pls). *J Bisnis Dan Pembang.*6(2):112–28.
- Muhtarom, A. (2015). Kepuasan Kerja, Komitmen Kerja, Manajemen, Guru Dan Staf. *Tarbawi.*;1:133–43.
- Singgih J. (2018). Pengaruh Kepercayaan, Komitmen, Konflik Sosial Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Hubungan.
- Agung Kh. Kendal. Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Komitmen Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen. *Tesis Semarang Univ Diponegoro.*
- Taurisa Cm. (2012). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada Pt. Sido Muncul Kaligawe Semarang). *Progr Magister Manaj Univ Diponegoro.* 2012;19(1):1–16.
- Sahur Mr. (2017). Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Majene. *Akt - J Penelit Ekon Dan Bisnis. Vol I, No.(E-:21–30.*
- Manaf A. (2015). Keberlanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas ( Studi Kasus : Kabupaten Kendal Dan Kota Pekalongan ). *J Kendal* 3(2):112–9.
- Elis Suyono. Pengaruh Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal ( Kpel ) Terhadap Pendapatan Petani Budidaya. 2006;
- Mcquaid R. (2009). Theory Of Organisasional Partnership- Partnership Advantages, Disadvantages And Succes Factors. *Employement Research Institute., Edinbg Napier Univ.*
- Iqbal M. (2007) Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian. *J Litbang Pertan.* 26(3):89–99.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta